

**IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN
HULUNOMOR 4 TAHUN 2012**

**(Studi Kasus di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

MARHOT SIREGAR
NIM. 10927007736

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

KATA PENGANTAR

Assalamu”alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka tabir keilmuan bagi ummat islam, sehingga berkat ajaran beliau dunia jadi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan dalam berpikir dan beramal untuk kesuksesan hidup didunia dan akhirat.

Dari hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah H. Awaluddin Siregar dan Ibu Hj. Nur Aman tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta aliran Do’a yang tak henti-hentinya agar penulis terus maju dan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Dan buat Istriiku tercinta Rifka Asriani yang selalu setia menemani dalam suka maupun dukaserta untuk yang terkasih dan tersayang anakku Riska Aulia sebagai penyemangat dan pelepas lelah disetiap aktivitasku yang menjadikan saya untuk terus dan terus berusaha untuk sukses dalam keluarga kecil saya. dan keenam saudaraku tersayang Abangku Saiful Bahrum, Abangku Maradona

Siregar, Kakakku Norma Sari, Kakakku Seriomas, Kakakku, Irda Wati, Adekku Saidah Siregar, dan Keponakanku, Saudara-saudara Iparku dan Keponakanku yang telah memberikan semangat dan inspirasi untuk penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak H. Muhammad Kastulani S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Ibuk Hj. Nuraini Sahu S.H., M.H. dan Bapak H. Maghfiroh, M.Ag Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan seluruh dosen serta karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Azwar Azis, SH, M.si selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak syafrinaldi, SH, MA dan Bambang Hermanti, S.Ag selaku penasehat Akademis yang memberikan nasehat dan masukan-masukan dalam pelaksanaan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru Riau dan Bapak kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta seluruh Karyawan dan

Karyawati yang telah Berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru Riau Angkatan 2009 Khususnya Lokal Ilmu Hukum 4 (empat) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Untuk pihak yang tidak disebutkan yang telah banyak membantu penulisan selama skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih

Atas semua jasa tersebut penulis berdo'a kepada Allah SWT agar ilmu dan amal yang telah diberikan itu mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin ya Rabbal 'Alamin. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akhir kata seandainya terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tanpa penulis sengaja dan penulis sadari dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon kritik serta masukan-masukan yang bersifat membangun, demi tercapainya hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermamfaat dalam meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan Hukum serta bermamfaat bagi siapapun yang membacanya.

Pekanbaru, November 2013

MARHOT SIREGAR
NIM. 10927007736

ABSTRAK

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut Tingkat Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam hal komunikasi, pendidikan, sikap petugas kolektor PBB, kesadaran, antusiasme dan tanggungjawab merupakan indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan Bagaimana konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Lapangan, Observasi, Wawancara, Angket dan Study Pustaka.

Hasil penelitian didapat bahwa Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan epek jera pada wajib pajak dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA TINGKOK	
A. Sejarah Desa Tingkok	14
B. Kondisi Umum Desa Tingkok	16
1. Keadaan Geografis Desa Tingkok	16
2. Luas Wilayah Desa Tingkok.....	17
3. Keadaan Topografi Desa Tingkok	17
4. Iklim	17
C. Pemerintahan Desa Tingkok	18
D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	18
1. Jumlah Penduduk Desa Tingkok.....	18
2. Tingkat Pendidikan Desa Tingkok.....	19
3. Mata Pencarian Penduduk Desa Tingkok	20
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan	21
1. Sejarah Pemungutan Pajak.....	21

2. Pengertian Pajak Bumi Bangunan.....	24
3. Dasar Hukum	27
4. Asas	27
5. Ketentuan Umum	29
6. Objek Pajak	32
7. Subjek Pajak.....	35
8. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak.....	37
9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	38
10. Sanksi	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	43
B. Konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu dan terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, merata materil dan spiritual berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.¹

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini terjadi antara lain:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.

¹Maria Farida, *Problematika Hukum Pajak*, [www. Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 19 Maret 2013, jam 13.00 wib.

²Kartasasmata, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.64.

3. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.²

Berdasarkan studi empiris di atas, di mana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin pembangunan:

1. Harus menguntungkan rakyat
2. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3. Harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya dan
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksud secara jujur, terbuka dan dipertanggungjawabkan³

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparturnya dalam pengelolaan pembangunan,

³Kartasmita, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta, Rafika Aditama, 1997), h. 56-57.

partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut.

Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara.⁴ Pajak mempunyai 2 fungsi yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Sebagaimana jenis pajak yang lain, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi.

Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat, Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada 2 tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak⁵ Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan ke dua adalah prinsip manfaat.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang, Di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak, Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.

⁴Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009) h.3.

⁵Mugrave dan Musgrave, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 43.

Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak, khususnya terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu.⁶

Pemerintah Kota Rokan Hulu dalam mengoptimalkan penarikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah melakukan beberapa langkah yaitu dengan mengadakan operasi tuntas penyuluhan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di

⁶ Perda Nomor 4 Tahun 2012, *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.

masing-masing perdesaan. Juga Panutan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di seluruh wilayah Rokan Hulu pada umumnya dan di Desa Tingkok pada khususnya. Penyebaran spanduk untuk penyampaian SPPT undian hadiah pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan juga spanduk untuk mengingatkan warga Kabupaten Rokan Hulu membayar pajak. Namun, hal tersebut belum mampu memberikan peringatan kepada masyarakat yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

Hal ini juga terjadi di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Padahal seperti yang sudah di uraikan di atas, di mana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu daerah. maka diharapkan juga masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi adalah:

1. Sikap dari masyarakat tersebut yang selalu menunda-nunda kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan belum sadarnya akan pentingnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

2. Motivasi masyarakat masih kurang baik untuk ikut serta dalam pembangunan suatu daerah melalui ikut berpartisipasi dalam pembayaranPBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dari ketentuan perda nomor 4 tahun 2012 pada ayat 4 di jelaskan bahwa Subjek PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai danmemperoleh manfaat atas bangunan.⁷ Jadi cukup jelas dari ketentuan peraturan daerah tersebut siapa yang berkewajiban dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HULUNOMOR 4 TAHUN 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”**.

⁷Ibid, h. 4.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran, maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus pada implementasi dan konsekuensi hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khusus mengenai partisipasi

masyarakat dalam membayar PBB(Pajak Bumi Bangunan) di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sebagai sumbangan penulis dalam bentuk skripsi pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk mengetahui persyaratan menempuh ujian sarjana hukum.
4. Diharapkan penelitian ini menjadi alat pendorong bagi penelitian yang lain, yang ingin melakukan penelitian lebih luas dan mendalam.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah: Metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten kota bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut⁸.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri sama.⁹

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- a. Dispemda Rokan Hulu
- b. Kepala Desa Tingkok
- c. Seluruhmasyarakat wajib pajak di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰ Teknik pengambilan sampel yang dilakukan purposive sampling, artinya peneliti menunjukkan langsung masyarakat wajib pajak Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Adapun yang diambil menjadi sampel adalah:

⁸ Ibid, h. 5.

⁹ Bambang sunggono, *Metodeligi Peneliian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta. h. 118.

¹⁰ Ibid. h. 119.

- a. Dispemda rokan hulu 1 orang
- b. Kepala desa tingkok 1 orang
- c. 50 Masyarakat wajib pajak di desa tingkok Kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

5. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini ada yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian masyarakat wajib pajak di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan tertulis atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden guna melengkapi data yang diperlukan masyarakat wajib pajak.
- c. Angket, Menurut Sangadji dan Sopiah angket adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan

kehadiranpeneliti atau suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban¹¹ dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada masyarakat di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

d. Study pustaka.

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan¹²

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data Kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹¹ Sangadji, mamang Etta dan Sopiah,. *Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010), h. 171.

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Rajawali Pers, 2006), h. 138.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mendapat arah permasalahan yang jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu:

BABI : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII : Gambaran Tentang Kedaan Masyarakat Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang meliputi Geografis, social, ekonomi, pendidikan dan agama.

BAB III : Tinjauan Teoritis, Pengertian pajak bumi dan bangunan, dasar hukum, asas, ketentuan umum, obyek pajak, subyek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara menghitung pajak dan surat pemberitahuan objek pajak (spop), surat pemberitahuan pajak terutang (sppt), surat ketetapan pajak (skp) dan sanksi.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : Penutup, dalam Hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Proses pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TINGKOK

A. Sejarah Desa Tingkok

Desa tingkok berdiripada tanggal 18 Februari tahun 2010, dengan disahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pemecahan dan pembentukan Desa di Kecamatan Tambusai, sebelumnya Desa Tingkok masuk dalam bagian desa Tambusai Timur. namun setelah disahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2010 menjadi desa tersendiri merupakan pecahan dari Desa Tambusai Timur. Desa tingkok terletak dalam wilayah Kecamatan Tambusai yang terletak pada garis 01.01 LU - 01.09 LU dan 102,041 BT - 102,059 BT yang berbatasan dengan Desa Tambusai Timur, dan Desa Tambusai Tengah. dengan jarak tempuh dari ibukota kecamatan lebih kurang 12 Km dan 50 Km dari ibu kota kabupaten, dan 250 Km dari ibu kota provinsi.

Sejarah terbentuknya Desa Tingkok berawal dari dibukanya pemukiman warga di kampung Tingkok pada Tahun 1947. Pada awal pembentukan wilayah Desa tingkok untuk pertama kali datanglah warga yang berasal dari provinsi di Sumatra Utara sebanyak 15 KK yang menempati wilayah RK I pada waktu itu yang sekarang telah berwujud menjadi sebuah dusun yang bernama dusun 1 (satu) Tingkok.

Pada Tanggal 4 April 1980 Datang warga Transmigran yang berasal dari daerah Sumatra utara tepatnya dari Kabupaten padang lawas dan Kabupaten padang lawas utara sebanyak 35 KK yang menempati RK II Pada waktu itu.

Sekarang ini telah berwujud menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun II (dua) teluk kasaidan selanjutnya berkembang baik pertambahan penduduk dari masyarakat setempat juga banyaknya pendatang yang ingin berdomisili di dusun II (dua) teluk kasai hingga dipecah menjadi dusun III (tiga) yang sekarang disebut dengan dusun tiga pardomuan.

Pada bulan Januari tahun 1998 datanglah warga Transmigran berasal dari daerah pasundan tepatnya dari daerah Bandung dan Sumedang Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 KK yang menempati wilayah RW V pada waktu itu yang mana sekarang telah berwujud menjadi sebuah dusun dengan nama Dusun IV (empat) sidomakmur.

Pada tahun 2010 baru ada gagasan pemekaran atau pembentukan Desa Tingkok yang diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Tambusai. Setelah melalui proses yang panjang maka barulah pada tanggal 02 Februari 2010 dalam sidang paripurna DPRD maka terbentuklah desa baru dengan nama DESA TINGKOK.

Gagasan nama Tingkok berasal dari nama sebuah sungai yang melintasi wilayah Desa Tingkok yang dikenal dengan nama *Sungai tingkok* yang dalam

artian bahasa mandailing yang berartikan lurus. Untuk menjadikan sebuah nama desa nama Tingkok yang mengandung makna sebuah keinginan dan harapan yang besar terhadap pembentukan wilayah ini menjadi sebuah desa yang diharapkan pada masanya nanti akan menjadi sebuah desa yang *lurus* dengan artian lurus budi pekerti baik dibidang agama, social, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya.¹³

B. Kondisi Umum Desa Tingkok

1. Keadaan Geografis Desa Tingkok

Adapun batas wilayah Desa Tingkok yaitu Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Rantau Sakti, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambusai Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sialang Rindang dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Panjang.

Tabel II.1
Letak dan Batas –Batas Wilayah Desa Tingkok

Letak Dan Batas-Batas Wilayah Desa		
1	Sebelah Selatan	Desa Sialang Rindang, Desa Sei Sitolang.
2	Sebelah Utara	Desa Payung Sekaki, Desa Rantau Sakti.
3	Sebelah Timur	Desa Tambusai Timur, Desa Suka Maju.
4	Sebelah Barat	Desa Rantau Panjang, Desa Batang Kumu

Sumber data: dokumen Desa Tingkok, 20 April 2013.

¹³ Dokumen Desa Tingkok, 13 Juli, 2013.

2. Luas Wilayah Desa Tingkok

Luas wilayah Desa Tingkok $\pm 37.200 \text{ Km}^2$. Jarak dari Desa Tingkok kePropinsi $\pm 250 \text{ Km}$ ditempuh dalam waktu 4,5 Jam, $\pm 50 \text{ Km}$ ke Kabupaten dan 12 Km Ke Kecamatan. Secara administratif wilayah Desa Tingkok terbagi menjadi 4 wilayah Dusun,8 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga. Sebagian besar Desa ini merupakan daerah dataran rendah hingga menengah, beriklim tropis temperatur rata-rata pada siang hari $30-31^{\circ} \text{ C}$ dan pada malam hari $20-21^{\circ}$, kelembapan 90-100% dan rata – rata curah hujan berkisar 781-2463 mm/tahun.

3. Keadaan Topografi Desa Tingkok

Secara umum keadaan topografi Desa Tingkok hampir sama dengan topografi desa lain di Kabupaten Rokan Hulu.Pada umumnya daerahyang ada di Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah dataran rendah hingga menengah dengan rasio 15 s/d 20 m dari permukaan laut. Dengan kondisi tersebut daerah tingkok sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan perkebunan sawit dan karet.

4. Iklim

Seperti telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Iklim di daerah Kabupaten Rokan Hulupada umumnya juga memiliki iklim yang sama begitu juga dengan DesaTingkok desa ini juga

merupakan desa dengan iklim tropis temperatur rata-rata pada siang hari 30-31^o C dan pada malam hari 20-21^o, kelembapan 90-100% dan rata – rata curah hujan berkisar 781-2463 mm/tahun.

C. Pemerintahan Desa Tingkok

Desa Tingkok merupakan sebuah desa yang secara pemerintahan masuk dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Desa Tingkok dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa ini terdiri dari empat dusun yaitu Dusun I tingkok, Dusun II teluk kasai, Dusun III pardomuan, Dusun IV Sido makmur serta terdiri dari delapan RW dan dua belas RT. Setiap dusun dikepalai oleh seorang kepala Dusun yang membawahi masing-masing Ketua RW serta Ketua RT.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk Desa Tingkok

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi per tanggal 30 Nopember 2012 jumlah penduduk 3.165 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.450 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.715 jiwa. Jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan Bulan Desember data penduduk diambil dari blangko yang di isi oleh ketua RT di lingkungan masing-masing seperti yang ada di tabel berikut ini:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Desa Tingkok Per Tanggal 30 Desember 2012
berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Keterangan	Jumlah jiwa
1	Jumlah kepala keluarga	641
1	Laki-laki	1450
2	Perempuan	1715
Jumlah jiwa		3165

Sumber data: dokumen Desa Tingkok 20 April 2013

2. Tingkat Pendidikan Desa Tingkok

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat sumber daya manusia. Tingkat sumber daya manusia akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan baru, guna mengatasi pengangguran. Berikut tabel tingkat rata-rata Pendidikan Warga Desa Tingkok:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Desa Tingkok Menurut Tingkat Pendidikannya

No	Keterangan	Jumlah jiwa
1	Tidak / Belum Sekolah	2.734
2	SD	231
3	SMP	75
4	SMA Sederajat	95
5	D.I, DII, D III	12
6	S.I	18
JUMLAH		3.165

Sumber data: dokumen Desa Tingkok, 20, April, 2013

Berdasarkan tabel II.3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tingkok tergolong masih rendah, sebab masih banyak

penduduk yang tidak berpendidikan formal dan yang berpendidikan hingga tingkat strata masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada yaitu hanya sekitar 3,41%.

3. Mata Pencarian Penduduk Desa Tingkok

Sebagian besar $\pm 59\%$ mata pencarian Penduduk Desa Tingkok yaitu petani atau pekebun Kelapa Sawit, yang mana setengah dari jumlah penduduk Desa Tingkok bergantung pada Tanaman Kelapa Swait.

Berikut data Mata pecaharian Penduduk desa Tingkok menurut

Tabel:

Tabel II.4
Mata Pencarian Penduduk Desa Tingkok

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani/ Pekebun	965
2	Wiraswasta	97
3	PNS	9
4	Honorer	31
5	Lain-lain	522
JUMLAH		1.624

Sumber data: dokumen Desa Tingkok, 20, April, 2013¹⁴

Berdasarkan tabel II.4 dapat dilihat bahwa tingkat mata pencarian penduduk desa tingkok tergolong tinggi, oleh karna itu semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu daerah khususnya desa tingkok maka semakin tinggi pula tingkat kesadarannya terhadap kemajuan suatu daerah.

¹⁴Dokumen Desa tingkok, April, 2013.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

1. Sejarah Pemungutan Pajak

Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Keberadaan pajak sebagai pungutan kepada rakyat suatu negara sudah ada sejak zaman Romawi. Pemungutan pajak pada zaman Romawi tidak dilakukan oleh raja, tetapi melalui pendelegasian wewenang kepada pemungut pajak yang disebut *publican*¹⁵.

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natural berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti

¹⁵ Soni Devano, 2006), dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 6.

pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah

dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji kerajaan sehingga sering kali mereka menerapkan pajak secara berlebihan.

Pada masa Gubernur Jendral Raffles (1811-1815) menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan banyak uang. Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan sistem *landrente stelsel*, dimana sistem pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala, India. Pada masa penjajahan Kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia bangsa indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat indonesia¹⁶.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Aturan Bea Meterai;
- b. Ordonansi Bea Balik Nama;
- c. Ordonansi Pajak Kekayaan;
- d. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
- e. Ordonansi Pajak Upah;

¹⁶*Ibid.*

- f. Ordonansi Pajak Potong;
- g. Ordonansi Pajak Pendapatan;
- h. Undang-undang Pajak Radio;
- i. Undang-undang Pajak Pembangunan.
- j. Undang-undang Pajak Peredaran.

2. Pengertian Pajak Bumi Bangunan dan fungsinya

- a. Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut:

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pajak bumi bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak bumi bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut.¹⁷

¹⁷Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsepaplikasi dan Penuntun Praktis*, Andi Offsed, Yogyakarta, h 20.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.¹⁸

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan.

b. Fungsi pajak:

1. **Fungsi anggaran** (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. **Fungsi mengatur** (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

¹⁸ Ibid h. 13.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terlepas dari definisi dan perdebatan esensi fungsi pajak sebagai *regulated* disamping fungsi *budgeter*, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam pembangunan.¹⁹ Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan.

¹⁹ Imam Soebechi, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 114.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak
- c. kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak hotel, dan lain-lain.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 12 tahun 1994.²⁰ Dan peraturan daerah Rokan Hulu nomor 04 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan, dikenal enam dasar atau asas pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
- b. Asas sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari indonesia, akan dikenakan pajak indonesia.

- c. Asas nasional/ kebangsaan, cara yang berdasarkan kebangsaan/ nasional menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan indonesia yang bertempat tinggal di indonesia membayar pajak.
- d. Asas yuridis, yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang,
- e. Asas ekonomis, yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat,
- f. Asas keuangan, menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut
- g. Memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan Menghindari pajak berganda.²¹

²¹ Andrian Sutedi, *Hukum pajak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) h. 22.

5. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 (UU No 12 Tahun 1985) adalah :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.²²

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat

²²Ibid, h. 8

transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Yang dimaksud dengan

- a. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:
 1. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan;
 2. Objek pajak sektor perkebunan;
 3. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.

4. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri;
5. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi;
6. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi;
7. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C;
8. Objek pajak pertambangan non migas galian C;
9. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama;
10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut;
11. Objek pajak usaha bidang perikanan darat; dan
12. Objek pajak yang bersifat khusus;²³

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang – undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada Wajib Pajak.

²³Kurnia Rahayu, Siti, *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu h. 28.

6. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 (UU No 12 Tahun 1985) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
- b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah

Pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi / tanah diperhatikan factor - faktor sebagai berikut :

1. Letak;
2. Peruntukkan;
3. Pemanfaatan; dan
4. Kondisi lingkungan dan lain – lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan;
2. Rekayasa;
3. Letak; dan
4. Kondisi lingkungan dan lain – lain.

c. Pengecualian Objek Pajak.

Berdasarkan Pasal 3 (UU No 12 Tahun 1994) objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah : Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan;
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang sejenis dengan itu;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan atau
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

d. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing – masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi- tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap

Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar. Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 3 (Peraturan Daerah Rokan Hulu No 04 Tahun 2012) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga

- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.²⁴

7. Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) Subjek Pajak adalah:

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak apabila suatu subjek pajak belum jelas wajib pajaknya.

²⁴ Ibid h. 7.

- d. Subjek pajak yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor (c) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam nomor (d) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dalam nomor (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f. Bila keterangan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor (d) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 (Perda Rokan Hulu No 04 Tahun 2012) Subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah:

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.²⁵

8. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 (UU No 12 Tahun 1985) besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah. Besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (limapersepuluh persen). Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga

Rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan,

²⁵ Loc cit h. 8.

khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:

1. Objek Pajak Perkebunan;
2. Objek Pajak Kehutanan;
3. Objek Pajak Lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai;
2. Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP PBB= Tarif Pajak x NJKP = $0.5 \% \times \{ \text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \}$

9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berdasarkan pasal 9 UU no 12 tahun 1985 SPOP, SPPT, dan SKP adalah:

- a. Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.

- b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal sebagai berikut:
 - 1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke- 1 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagaimana tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.
- f. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke 2 adalah selisih pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁶

10. Sanksi

a. Sanksi Administrasi

Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

²⁶ Soparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, h. 20.

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.

Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.

1. Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar.
2. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
3. Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak yang terutang dan sanksi administratif tidak atau kurang bayar diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
4. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa.

b. Sanksi pidana

1. Barang siapa tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak;
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
4. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
5. tidak menunjukkan data atau menyampaikan keterangan yang diperlukan;

Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Pembayaran pajak bumi dan bangunan seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu harus selalu dibayarkan dan tepat pada waktunya. Sampai saat ini di Kabupaten Rokan Hulu masih banyak masyarakat yang membayarkan pajak bumi dan bangunan tidak tepat pada waktunya.²⁷ Pendapatan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih banyak yang tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan.²⁸

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu alat pendorong bagi masyarakat untuk kemajuan suatu daerah, dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan maka tingkat kesejahteraan suatu daerah tersebutpun akan tinggi demikian juga bagi masyarakat desa tingkok kecamatan tambusai kabupaten

²⁷ Ade Saputra, (Staf pembayaran pajak bumi dan bangunan dispenmda Rokan Hulu) wawancara, di Rokan Hulu, Rabu, 10 Juli 2013.

²⁸ Ade Saputra, *ibid*.

rokan hulu. Maka dalam hal ini perlu dibahas mengenai Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut.

Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan jawaban-jawaban responden mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tingkok. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ketepatan waktu membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel IV.1
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Selalu tepat waktu	13	26%
2	Jarang tepat waktu	7	14%
3	Tidak tepat waktu	30	60%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 13 atau 26% responden yang menyatakan selalu tepat waktu, sebanyak 7 atau 14% responden menyatakan jarang tepat waktu dan sebanyak 30 atau 60% responden yang menyatakan tidak tepat waktu. Melihat tanggapan responden tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat atau responden dalam membayar pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimilikinya tidak tepat pada waktunya.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat atau responden dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimilikinya tidak tepat pada waktunya.

Sedangkan berdasarkan peraturan Daerah Rokan Hulu nomor 04 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dijelaskan bahwa Pembayaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan SKPD. Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh wajib pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2
Tanggapan Responden Mengenai Pentingnya Pembayaran Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Penting	7	14%
2	kurang penting	10	20%
3	Tidak penting	33	66%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 7 atau 14% responden yang menyatakan penting, sebanyak 10 atau 20% responden menyatakan kurang penting, dan sebanyak 33 atau 66% responden yang menyatakan tidak penting.

Melihat tanggapan responden tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya tanggapan responden mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah tidak penting. Artinya masyarakat belum menyadari pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak terlepas dari proses birokrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Begitu juga yang harus dilaksanakan oleh

masyarakat Desa Tingkok yang akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa proses birokrasi yang harus dilaksanakan dalam pembyaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu Setelah SPPT disampaikan wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran. wajib pajak yang telah menerima SPPT dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

1) Bank Pemerintah

Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dala SPPT yang diterima.

2) Petugas Pemungut

Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukan SPPT dan mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB.

3) Kantor Pos dan Giro

Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.

4) Dengan cara transfer

Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan

mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPPT.²⁹

Adapun tanggapan responden mengenai proses birokrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Mengenai Proses Birokrasi Pelaksanaan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mudah	5	10%
2	Cukup sulit	17	34%
3	Sulit	28	56%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai Proses birokrasi pelaksanaan pembayaran pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 5 atau 10% responden yang menyatakan mudah, sebanyak 17 atau 34% responden menyatakan cukup sulit, dan sebanyak 28 atau 56% responden yang menyatakan sulit.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat atau responden menyatakan proses

²⁹Ade Saputra, *op.cit.*

birokrasi yang ada sulit sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tingkok.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat wajib pajak dan kurangnya pengetahuan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan sisten yang di berlakukan pada masyarakat wajib pajak mereka tidak mengerti tentang pembayaran tersebut. Wajib pajak hanya mengerti pembayarannya dengan dilakukan penagihan oleh pihak terkait, jika hal tersebut tidak dilakukan atau hanya dilakukan dengan surat pemberitahuan pajak terutang pada wajib pajak mereka yang memiliki kewajiban acuh takacuh atas kewajibannya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Faktor lain dari pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat juga dilihat dari jarak lokasi tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan tempat tinggal masyarakat Desa Tingkok, kurang mengertinya masyarakat mengenai pembayaran terhadap pajak bumi dan bangunan.³⁰

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai jarak tempat tinggal dengan tempat pembyaran pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

³⁰Observasi, (Rokan Hilu), Mei 2013.

Tabel IV.4
Tanggapan Responden Mengenai Jarak Tempat Tinggal dengan *Outlet*/
Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Dekat	8	16%
2	Cukup jauh	24	48%
3	Jauh	18	36%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai jarak tempat tinggal dengan tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu sebanyak 8 atau 16% responden yang menyatakan dekat, sebanyak 24 atau 48% responden menyatakan cukup jauh, dan sebanyak 18 atau 36% responden yang menyatakan tidak jauh.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa jarak tempat tinggal masyarakat pada umumnya cukup jauh dengan tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan kurangnya jumlah *outlet*/ tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut juga yang menjadi salah satu penyebab tidak tepatnya waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tingkok.

Selanjutnya, wajib pajak di Desa Tingkok mengungkapkan:

“Bayar pajak atau tidak sepertinya tidak ada pengaruh, kondisi kami tidak ada perubahan, pembangunan desa juga begitu-begitu saja. Apalagi kalau mau melakukan pembayaran di bank atau kantor pos tidak mengerti, selain itu lokasi juga jauh. Lagipula petugas tidak begitu giat dalam pemungutan, saat penyampaian sppt petugas memang menawarkan untuk

menitipkan pembayaran tapi jika kita belum membayar, petugas tidak mengulangi lagi.”

Selain lokasi tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang cukup jauh, dalam penelitian ini juga akan dilihat mengenai biaya administrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai biaya administrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Mengenai Biaya Administrasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Murah	5	10%
2	Sedang	3	6%
3	Mahal	42	84%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai biaya administrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 5 atau 10% responden yang menyatakan murah, sebanyak 3 atau 6% responden menyatakan sedang, dan sebanyak 42 atau 84% responden yang menyatakan mahal.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa menurut masyarakat Desa Tingkok biaya administrasi pembayaran pajak adalah mahal sehingga sebagian besar masyarakat Desa

Tingkok menjadi lalai atau enggan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil observasi bahwa lingkungan tempat tinggal masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena lingkungan masyarakat Desa Tingkok banyak yang kurang memperdulikan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. sehingga banyak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan sebab mayoritas penduduk Desa Tingkok adalah petani yang kegiatannya disekitar tempat bekerjanya dan rumah tempat tinggal.³¹

Untuk mengetahui tanggapan reponden mengenai pengaruh lingkungan dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Lingkungan dalam
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mempengaruhi	26	52%
2	Kurang mempengaruhi	11	22%
3	Tidak mempengaruhi	13	26%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pengaruh lingkungan dalam

³¹ Observasi, (Desa Tingkok), Mei 2013.

pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 26 atau 52% responden yang menyatakan mempengaruhi, sebanyak 11 atau 22% responden menyatakan kurang mempengaruhi, dan sebanyak 13 atau 26% responden yang menyatakan tidak mempengaruhi.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tingkok. Masyarakat Desa Tingkok sebagian besar adalah bekerja sebagai petani padi dan perkebunan yang kegiatan masyarakat hanya seputar lokasi tempat pekerjaannya.³²

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Yusuf Harahap, Kepala Desa Tingkok:

“Masyarakat tidak mengerti pentingnya PBB-P2 dalam pembiayaan pembangunan. Masyarakat belum berpikir sampai kesitu mungkin karena pendidikan yang masih rendah. Terkadang juga saat ditagih wajib pajak sudah pindah. Terkadang tanah sudah dijual tetapi yang membeli tanah tidak melaporkan perubahan sehingga pajak tetap atas nama pemilik yang lama, tentu saja pemilik yang lama enggan untuk membayarnya. Terkadang wajib pajak sudah meninggal tetapi ahli waris tidak melaporkan perubahan sehingga pajak tetap atas nama pemilik yang lama. Terkadang terjadi kepemilikan ganda, ini terjadi karena pada saat tanah dijual, pembeli melapor tetapi data pemilik lama tidak dirubah mengakibatkan satu objek pajak tercatat dimiliki oleh dua wajib pajak, hal ini dipastikan target tak akan terealisasi sepenuhnya bahkan masyarakat wajib pajak tidak enggan mengatakan tidak ada manfaat dan guna kami membayar pajak.”

³² Observasi, (Desa Langsung Permai), Mei 2013.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.7
Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Pembayaran Pajak Bumidan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Bermanfaat	7	14%
2	kurang bermanfaat	8	16%
3	Tidak bermanfaat	35	70%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai manfaat pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 7 atau 14% responden yang menyatakan bermanfaat, sebanyak 8 atau 16% responden menyatakan kurang bermanfaat dan sebanyak 35 atau 70% responden yang menyatakan tidak bermanfaat. Melihat tanggapan responden tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya tanggapan responden mengenai manfaat pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah tidak bermanfaat.

Artinya masyarakat kurang menyadari mengenai manfaat pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutama dalam mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan observasi bahwa kondisi jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Tingkok adalah dari kondisi jalan bisa dikatakan belum memadai dan masih banyak yang belum sesuai atau tidak layak untuk dilalui. Selanjutnya dari infrastruktur seperti puskesmas, sekolahan, kantor desa dan sarana umum lainnya jugabelum memadai.³³

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keadaan jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Tingkok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.8
Tanggapan Responden Mengenai Keadaan Jalan dan Infrastruktur yang
Ada di Desa Tingkok

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Bagus	14	28%
2	Biasa saja	8	16%
3	Tidak bagus	28	56%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.8 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian diketahui bahwa tanggapan responden mengenai keadaan jalan dan infrastruktur yaitu sebanyak 14 atau 28% responden yang menyatakan bagus, sebanyak 8 atau 16% responden menyatakan biasa saja, dan sebanyak 28 atau 56% responden yang menyatakan tidak bagus.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa keadaan atau kondisi jalan dan infrastruktur yang ada di Desa

³³ Observasi, (Desa Tingkok), Mei 2013.

Tingkok dapat dikatakan tidak bagus. Artinya belum ada terlihat perbaikan atau peningkatan pembangunan dan infrastruktur khususnya di desa tingkok.

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Pembayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Indonesia sebagai Negara hukum akan menerapkan peraturan-peraturan yang telah dibuatnya kepada masyarakat Indonesia sebagai subjek hukum. Namun apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut, ada konsekuensi hukum yang akan diberlakukan pada masyarakat. Dalam hal ini, Peraturan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencantumkan sanksi didalam peraturan daerah tersebut yaitu berupa sanksi administratif.

Dalam hal penerapan peraturan daerah ini, maka hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat Desa Tingkok sendiri masih banyak yang lalai terhadap kewajibanya untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mereka miliki. hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih cukup rendah.

Aparat desa tingkok tidak berhenti sampai disitu saja, ketika wajib pajak lalai dan tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka aparat desa memberikan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terutang). Dalam SPPT ini diterangkan bahwa pajak tersebut harus dilunasi paling lambat 6 bulan setelah menerima surat tersebut. Apabila wajib pajak

tetap mengabaikan SPPT ini, maka dilanjutkan dengan memberikan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administratif berupa bunga atau denda sebanyak 2% setiap bulan.

Setelah aparat desa tingkok memberikan surat pemberitahuan dan surat tagihan tersebut, aparat desa berhenti sampai disitu saja. Padahal, masih ada konsekuensi yang dapat diberlakukan berupa surat paksa atau penyitaan. Maka dapat dilihat bahwa aparat desa tingkok melakukan penagihan ini tidak maksimal sehingga masyarakat desa tingkok menganggap tindakan yang dilakukan aparat desa tersebut hanya sebagai gertakan saja.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi atau denda kepada orang-orang yang tidak atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.8
Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pihak Terkit dalam
Memberikan Sanksi/ Denda Bila Tidak/ Terlambat Membayar Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mempengaruhi	16	32%
2	Kurang mempengaruhi	8	16%
3	Tidak mempengaruhi	26	52%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.8 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi/ denda bagi yang terlambat atau tidaak membayar pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebanyak 16 atau 32% responden yang menyatakan mempengaruhi, sebanyak 8 atau 16% responden menyatakan kurang mempengaruhi, dan sebanyak 26 atau 52% responden yang menyatakan tidak mempengaruhi.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan pada umumnya masyarakat menyatakan bahwa penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang terlambat atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat Desa Tingkok. hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah Dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya Dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimilikinya walau sudah ada sanksinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Implementasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan peraturan daerah Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 (studi kasus di desa tingkok kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tingkok belum maksimal. Dikarenakan Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. kurang fahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT Dan lokasi wajib pajak sulit dijangkau tentu saja berpengaruh terhadap realisasi pemungutan pajak yaitu jauh dari target yang ditetapkan.

2. Konsekuensi hukum dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang terlambat atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah. Dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya yang dapat memberikan efek jera pada wajib pajak. Dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimilikinya walau sudah ada sanksinya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Tingkok sebaiknya Pajak Bumi dan Bangunan juga dibayarkan sebab pajak tersebut penting, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal, selain itu banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari hasil pembayaran pajak karena akan mempercepat dan mempermudah

pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana umum yang ada di daerah tersebut.

2. Hendaknya pihak Desa, Kecamatan atau pihak Kabupaten memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada desa yang realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi, itu sebagai motivasi untuk Kepala Desa dalam menggerakkan perangkat desanya agar lebih giat memungut pajaknya.
3. Sebaiknya pihak terkait dalam hal pemberian sanksi pada masyarakat yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan harus melaksanakan eksekusi sebagaimana aturan yang mengatur dalam perda tersebut Tidak menjalankan aturan dengan setengah-setengah.
4. Sebaiknya pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan juga mengenai birokrasi dan administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo Santoso *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsepaplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta, Andi Offsed, 2010).
- Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi Ke-5*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2011).
- Kurnia Rahayu, Siti, *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010).
- M Steers, Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta.: Erlangga, 1986)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Meliala, Tulis dan Fransisca Widiarti Oetomo, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Semesta Media, 2009).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta, Rapika Aditama, 2008).
- Rusjdi, Muhammad, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012).
- Singarimbun, Masri dan Sofiaan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Soemitro, Rachmat. 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung : PT ERESKO, 1989).
- Soparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008).
- Suandy, Early, *Hukum Pajak*. (Yogyakarta : Salemba Empat, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Sunggono Bambang, *Metodelogi Peneliian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2004).
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi Ke- 10*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011).

Y. Sri Pudiarmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Andi, 2009).

Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2012 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*